

SKRIPSI

REGULASI PERAMPASAN ASET MELALUI *NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DAN URGENSI PENERAPANNYA DALAM *ASSET RECOVERY*

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Di Universitas Andalas**

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

REZKI BERMANA PUTRA

2210112164

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 42/PK. IV/IV/2026



No. Alumni Universitas	Rezki Bermiana Putra		No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir	: Padang/ 14 Januari 2004	f. Tanggal Lulus	: 12 Agustus 2026
b. Nama Orangtua	: Nasril Ermawati	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian
c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 4 Tahun
d. PK	: Hukum Pidana	i. IPK	: 3,55
e. No. BP	2210112164	j. Alamat	: Balai Baru, Padang

REGULASI PERAMPASAN ASET MELALUI *NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DAN URGENSI PENERAPANNYA DALAM *ASSET RECOVERY*

(Rezki Bermiana Putra, 2210112164, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 96 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menerapkan metode perampasan aset tindak pidana korupsi dengan bergantung kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut belum mengakomodir terkait perampasan aset secara maksimal karena dalam situasi ketika tersangka tidak ditemukan, melarikan diri, tidak memiliki ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditelusuri, maka perampasan aset tidak dapat dilaksanakan. Untuk mengakomodir permasalahan tersebut, Indonesia sebenarnya sudah menyusun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengadopsi konsep NCB Asset Forfeiture seperti yang telah tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Ketentuan tersebut menerapkan mekanisme perampasan aset yang dilaksanakan tanpa melalui proses pidana, dimana proses pidana ini dalam kasus tertentu mengalami hambatan untuk dimaksimalkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa negara sudah ada yang menerapkan konsep NCB Asset Forfeiture seperti Amerika Serikat dengan metode yang dikenal dengan konsep civil forfeiture berdasarkan Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000. Australia juga menerapkan NCB Asset Forfeiture dalam sistem Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002). Selain itu Jerman juga mengatur NCB Asset Forfeiture dalam KUHP (StGB) dan juga KUHPA (StPO). Negara-negara yang telah mengadopsi metode tersebut berhasil menaikkan angka pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi. Dibandingkan Indonesia, angka pengembalian kerugian keuangan negara masih sangat jauh dari negara-negara diatas. Oleh karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk segera menerapkan konsep NCB Asset Forfeiture dalam peraturan perundang-undangan guna meningkatkan asset recovery.

Kata Kunci: *Regulasi, Korupsi, Perampasan Aset, NCB Asset Forfeiture, Asset Recovery.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 12 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan		Penguji II
Nama Terang	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan:



Alumni University Number	Rezki Bermana Putra	Alumni University Number
a. Place/Date of Birth : Padang / January 14 th 2004	f. Graduation Date : August 12 th , 2026	
b. Parents' Name : Nasril Ermawati	g. Pass Predicate : Cumlaude	
c. Faculty : Law	h. Length of Study : 4 Years	
d. Concentration : Criminal Law	i. GPA : 3,55	
e. Student ID : 2210112164	j. Address : Balai Baru, Padang	

ASSET FORFEITURE REGULATIONS THROUGH NONCONVICTION BASED ASSET FORFEITURE AND THE URGENCY OF ITS IMPLEMENTATION IN ASSET RECOVERY

(Rezki Bermana Putra, 2210112164, Faculty of Law, Andalas University, 96 Pages, 2026)

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with one of the highest levels of corruption in the world. Current laws and regulations in Indonesia still apply asset forfeiture for corruption crimes, relying on a final and binding court decision to confiscate assets suspected of originating from the crime. These laws and regulations do not fully accommodate asset forfeiture, because in situations where the suspect is not found, has fled, has no heirs, or cannot be traced, asset forfeiture cannot be implemented. To accommodate these problems, Indonesia has actually drafted an Asset Confiscation Bill by adopting the NCB Asset Forfeiture concept as stipulated in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), which has been ratified by Indonesia in Law Number 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption 2003. This provision applies an asset confiscation mechanism that is carried out without going through a criminal process, where this criminal process in certain cases experiences obstacles to being maximized and requires a long time. Several countries have implemented the NCB Asset Forfeiture concept, such as the United States with a method known as the civil forfeiture concept based on the Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000. Australia also applies NCB Asset Forfeiture in the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002) system. In addition, Germany also regulates NCB Asset Forfeiture in the Criminal Code (StGB) and the Criminal Procedure Code (StPO). Countries that have adopted this method have successfully increased the rate of state financial loss recovery (asset recovery) due to corruption. Compared to Indonesia, its rate of state financial loss recovery still lags far behind those countries. Therefore, it is crucial for Indonesia to immediately implement the NCB Asset Forfeiture concept in its legislation to improve asset recovery.

Keywords: Regulation, Corruption, Asset Confiscation, NCB Asset Forfeiture, Asset Recovery

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 12th, 2026.

Examiner,

Signature		Examiner II
Name	Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.	Felia Hermayenti, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: